

BAB I

GAMBARAN UMUM

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP disusun sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dilihat dari hal tersebut, maka tujuan dari penyusunan LkjIP antara lain:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah;
2. Untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah;
4. Untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat;
5. Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas; dan
6. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tuban Nomor Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 45 Tahun 2022 tentang

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban maka Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Otonomi Daerah dalam bidang Lingkungan Hidup dan Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan perhubungan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang lingkungan hidup dan perhubungan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang lingkungan hidup dan perhubungan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup dan perhubungan;
- e. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;
- f. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan;
- g. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
- h. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tuban Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022

tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

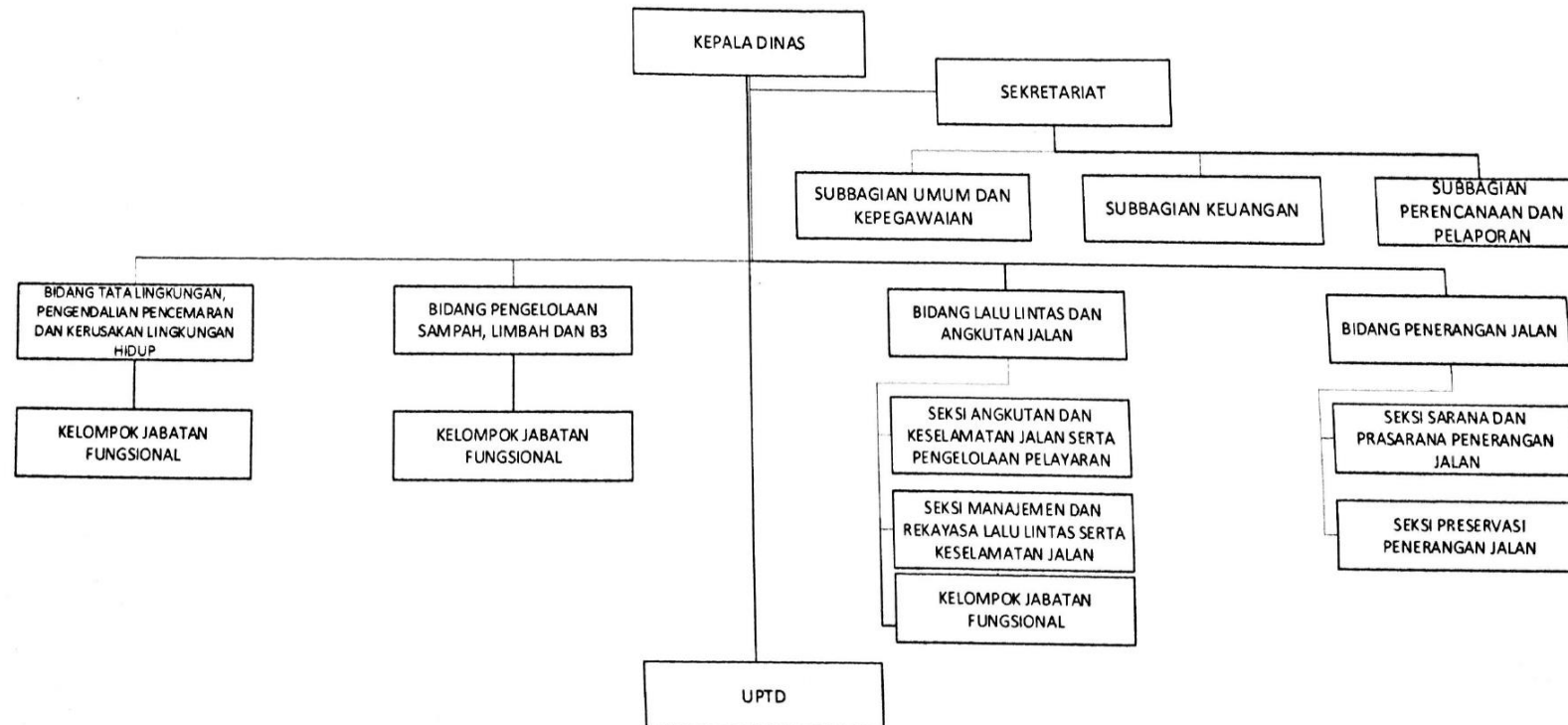
1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta penyusunan program dan laporan;
3. Bidang Tata Lingkungan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang pengelolaan sampah, limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun;
5. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
6. Bidang Penerangan Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang penerangan jalan;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional

dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pelayanan laboratorium lingkungan;

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengujian kendaraan bermotor;
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang jasa terminal;
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengelolaan persampahan;
11. Kelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian atau Kepala Seksi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

A.

SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
 KABUPATEN TUBAN



B.

SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN



1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

Sebagai penyelenggara urusan Pemerintah Urusan Lingkungan Hidup dan Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan tak lepas dari permasalahan yang menjadi fungsi pokoknya dalam menjalankan tugasnya. Adapun beberapa permasalahan yang menjadi fokus Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan yaitu:

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup;
2. Rendahnya kualitas tutupan lahan;
3. Masih terjadinya banjir akibat kurangnya serapan air ke tanah yang disebabkan berkurangnya tutupan lahan diwilayah dataran tinggi;
4. Belum optimalnya pengelolaan sampah;
5. Penurunan kualitas air dan udara;
6. Kurangnya angkutan publik yang tersedia;
7. Penyebaran Infrastruktur Perhubungan yang belum merata;
8. Meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi dan menurunnya minat masyarakat terhadap angkutan umum;
9. Potensi kemacetan dan kecelakaan di jalan raya masih tinggi.

1.4 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Tuban Nomor 45 tahun 2022 tentang Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Cara Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk tersedianya Lingkungan Hidup dan Perhubungan dokumen perencanaan Dinas 1 Kabupaten Tuban dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang mampu beradaptasi dengan segala perubahan – perubahan lingkungan strategis. Tahun 2025 merupakan tahun transisi dimana pada awal perencanaan tahun 2025 Rencana Kinerja Perangkat Daerah masih berdasarkan Rencana Strategis 2021-2026, dan pada perubahan Rencana Kinerja Perangkat Daerah 2025 disusun berdasarkan Rencana Strategis untuk Tahun 2025 – 2029.

Untuk itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga disusun berdasarkan Rencana Strategis tersebut. Rencana strategis ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban dengan uraian sebagai berikut:

2.1.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan berdasarkan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan tak terlepas dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Merujuk hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan mengampu visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu **“Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan”** dan Misi ke-1 **“Membangun dan mewujudkan Infrastruktur Desa dan Utilitas kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan, serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan ssosial, ekonomi dan budaya, serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal”**.

Selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta tugas dan fungsinya, maka telah ditetapkan tujuan

Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tahun 2021 - 2026 yaitu:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan Indikator Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL)
2. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur, sasaran Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan Yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas Antar Wilayah di Kabupaten Tuban Untuk Mendukung One Village One Product (OVOP) dan Pembangunan Di Wilayah Kab/Kota dengan Indikator Rasio Konektivitas, Rasio Jalan dengan standar APJ Lengkap, dan Tingkat Pelayanan Jalan (LoS).

2.1.2 Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Dengan disusunnya RPJMD 2025 dan 2025, maka Perangkat Daerah menindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dimaksud untuk menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang diampu oleh Dinas Lingkungna Hidup dan Perhubungan yaitu Visi Bupati Kabupaten Tuban, yaitu “Mbangun Deso Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan! Untuk Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, dan Berkelanjutan”, serta Misi Bupati ke-1, yaitu “Memantapkan Aksesibilitas Infrastruktur Desa dan Utilitas Kota yang Terpadu, Partisipatif, serta Berwawasan Lingkungan”.

Guna mendukung pencapaian visi dan misi tersebut secara terarah dan berkesinambungan, maka perlu dirumuskan tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban sebagai landasan strategis yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Konektivitas Antar Wilayah dengan sasaran:

1. Meningkatkan kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan;

2. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan Kualitas Pelayanan Jalan;
3. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan.

Untuk urusan lingkungan hidup, indikator kinerja utama IKA, IKU dan IKL masih digunakan untuk menggambarkan kualitas lingkungan hidup yang baik.

Sedangkan untuk urusan perhubungan, Rasio Jalan dengan standar APJ Lengkap tidak lagi dijadikan indikator kinerja utama karena indikator ini merupakan penunjang untuk Pelayanan Jalan yang lebih baik dan digambarkan pada indikator Tingkat Pelayanan Jalan (LoS Jalan). Disamping itu, untuk mengukur sasaran konektivitas antar wilayah masih dicerminkan dengan Rasio Konektivitas.

Sebagai penyelenggara pelayanan publik, pada Rencana Strategis 2025-2029 memuat indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indikator ini sangat penting untuk dapat memberikan gambaran pelaksanaan pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan kepada Masyarakat.

3.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

3.2.1 PK Tahun 2025

Untuk mencapai sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan yang di muat pada Rencana Strategis 2021-2026, maka rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban tahun di 2025 ini sebagai upaya untuk mewujudkan capaian sasaran kinerja yaitu:

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Hitung Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	IKA	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}{2}}$	75.29
		IKU	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (leu - 0,1) \right)$	80.23

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Hitung Indikator Kinerja	Target Kinerja
		IKL	$IKL = 100 - \left(\left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3} \right)$	64.16
2	Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan Yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas Antar Wilayah di Kabupaten Tuban Untuk Mendukung One Village One Product (OVOP) dan Pembangunan Di Wilayah Kab/Kota	Rasio Konektivitas Kab/Kota	Rasio konektivitas Kabupaten atau Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	74.55
		Rasio Jalan dengan standar APJ Lengkap	Persentase panjang jalan yang memenuhi standar kelengkapan jalan (jumlah panjang jalan yang memenuhi standar jalan dibagi jumlah panjang keseleruhan x 100%)	44%
		Tingkat pelayanan jalan (LoS)	Persentase panjang ruas jalan dengan nilai tingkat pelayanan jalan diatas D/lancar(Jumlah panjang ruas jalan dengan LoS diatas D dibagi total panjang jalan x 100%)	100%

3.2.2 Review Perubahan PK Tahun 2025

Dengan disusunnya Rencana Strategis 2025-2029, dilakukan penyesuaian perjanjian kinerja di Tahun 2025. Untuk mencapai sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan yang diamanatkan pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029, maka rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban tahun di 2025 ini sebagai upaya untuk mewujudkan capaian sasaran kinerja yaitu:

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Hitung Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Meningkatkan kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	IKA	$IKA \text{ Kab./Kota} = \frac{\sum IKA \text{ Titik Pantau}_i}{Jumlah \text{ Titik Pantau}}$	75.29
		IKU	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,99} (I_{INA} - 0,01) \right)$	80.23

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Hitung Indikator Kinerja	Target Kinerja
		IKL	$IKL = IKTL + \text{Faktor Koreksi Gambut}$ $IKTL = 100 - [84,3 - (TL \times 100)] \times \frac{50}{54,3}$ $TL = \frac{\sum_{i=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan } i \times C_i)}{\sum_{i=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan } i)}$	64.16
2	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah dan Kualitas Pelayanan Jalan	Rasio Konektivitas Kab/Kota	Rasio konektivitas Kabupaten atau Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	74.8
		Tingkat pelayanan jalan (LoS)	Persentase panjang ruas jalan dengan nilai tingkat pelayanan jalan diatas D/lancar(Jumlah panjang ruas jalan dengan LoS diatas D dibagi total panjang jalan x 100%)	100%
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	91.6

3.2.3 Ringkasan Perubahan PK Tahun 2025

Lebih jelas untuk review/perubahan perjanjian kinerja Dinas Lingkungna Hidup dan Perhubungan Tahun 2025 dapat dilihat ditabel berikut:

PK AWAL PERENCANAAN (Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026)			REVIEW/PERUBAHAN PK (Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029)			KETERANGAN
No	Sasaran	Indikator	No	Sasaran	Indikator	
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		1	Meningkatkan kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan		Berubah
a.		Indeks Kualitas Air (IKA)	a.		Indeks Kualitas Air (IKA)	Tetap
b.		Indeks Kualitas Udara (IKU)	b.		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Tetap
c.		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	c.		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Tetap

PK AWAL PERENCANAAN (Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026)			REVIEW/PERUBAHAN PK (Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029)			KETERANGAN
No	Sasaran	Indikator	No	Sasaran	Indikator	
2	Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan Yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas Antar Wilayah di Kabupaten Tuban Untuk Mendukung One Village One Product (OVOP) dan Pembangunan Di Wilayah Kab/Kota		2	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah dan Kualitas Pelayanan Jalan		Berubah
a.		Rasio Konektivitas Kab/Kota	a.		Rasio Konektivitas Kab/Kota	Tetap
b.		Rasio Jalan dengan standar APJ Lengkap				Dihapus
c.		Tingkat pelayanan jalan (LoS)	b.		Tingkat pelayanan jalan (LoS)	Tetap
			3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Ditambahkan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2025, pelaksanaan awal dilaksanakan berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2025, dan Perjanjian Kerja Tahun 2025 sampai dengan tribulan III (tiga) Tahun 2025. Sementara pada tribulan 4, selaras dengan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dan juga berdasarkan RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 yang telah tersusun, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tahun 2025-2029, Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, dan Perjanjian Kerja Perubahan Tahun 2025

A. Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kerja Tahun 2025 (Perencanaan Awal)

Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan sampai dengan TW III Tahun 2025 lebih detail dijabarkan pada tabel berikut:

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (s/d TW 3)	Realisasi Anggaran (s/d TW 3)	Program/Kegiatan	Bentuk kegiatan yang telah dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup							
	Indeks Kualitas Air (IKA)	75.29	58,952,131,358	belum rilis	21,898,498,269		
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	80.23		belum rilis			
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	64.16		belum rilis			
						Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
						Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Telah dilaksanakan Penyusunan Dokumen IKPLHD, Pelaksanaan pemantauan kualitas air dan udara pada 78 titik
						Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persiapan Rehabilitasi Lahan Kritis seluas 14.5 Ha di Wilayah desa Ngrejeng kecamatan Grabagan, desa Maibit kecamatan Rengel, dan desa Kepohagung kecamatan Plumpang.
						Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (s/d TW 3)	Realisasi Anggaran (s/d TW 3)	Program/Kegiatan	Bentuk kegiatan yang telah dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
						Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan sarpras Kehati sebanyak 2 Unit yang berlokasi di RTH Singgahan dan RTH Jatirogo
						Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	
						Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3	Verifikasi terhadap rincian teknis Penyimpanan LB3 sebanyak 16 usaha / kegiatan
						Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
						Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Rincian Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi sebanyak 17 Dokumen, Penagawasan terhadap pelaku usaha yang berpotensi melakukan pencemaran lingkungan sebanyak 36 Badan Usaha
						Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (s/d TW 3)	Realisasi Anggaran (s/d TW 3)	Program/Kegiatan	Bentuk kegiatan yang telah dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
						Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan penyuluhan kepada calon peserta Adiwiyata Propinsi, Nasional, Mandiri, Proklamasi dsb
						Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	
						Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persiapan penilaian pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten
						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
						Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Penanganan pengaduan lingkungan hidup sebanyak 12 Aduan
						Program Pengelolaan Persampahan	
						Kegiatan Pengelolaan Sampah	pembinaan, monitoring dan evaluasi dilapangan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Persampahan sebanyak 54 kelompok, penyediaan sarpras persampahan sebanyak 181 unit, dan penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sebanyak 53871 ton

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (s/d TW 3)	Realisasi Anggaran (s/d TW 3)	Program/Kegiatan	Bentuk kegiatan yang telah dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan Yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas Antar Wilayah di Kabupaten Tuban Untuk Mendukung One Village One Product (OVOP) dan Pembangunan Di Wilayah Kab/Kota							
	Rasio Konektivitas Kab/Kota	74.55	76,979,947,760.00	belum rilis	29,937,821,695		
	Rasio Jalan dengan standar APJ Lengkap	44%		belum rilis			
	Tingkat pelayanan jalan (LoS)	100%		belum rilis			
						Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
						Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Telah dilakukan penyusunan Kajian Kelembagaan Angkutan Umum
						Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan prasarana jalan sebanyak 16 Unit dan perlengkapan jalan sebanyak 5300 unit

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (s/d TW 3)	Realisasi Anggaran (s/d TW 3)	Program/Kegiatan	Bentuk kegiatan yang telah dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
						Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Rekonsiliasi perparkiran, penataan parkir wilayah kota tuban
						Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	pengujian kendaraan bermotor sebanyak 6153 Unit, evaluasi dan monitoring kegiatan sebanyak 9 dokumen, penyediaan dan pemeliharaan sarpras pengujian berkala sebanyak 18 unit
						Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten 9 kali, Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) 2 Unit, Pelaksanaan Forum Lalu Lintas sebanyak 29 kali,
						Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin sebanyak 13 Laporan
						Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum Gratis sebanyak 84 Unit
						Program Pengelolaan Pelayaran	

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (s/d TW 3)	Realisasi Anggaran (s/d TW 3)	Program/Kegiatan	Bentuk kegiatan yang telah dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
						Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi penerbitan pas kapal sebanyak 49 dokumen

B. Capaian Atas Review/Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis untuk dilakukan perbaikan di tahun mendatang. Capaian akhir Tahun 2025 serta target kinerja urusan Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Capaian Kinerja Tahun 2025

No .	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
1	Meningkatkan kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kualitas Air (IKA)	75.29	75.85	100.74%
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	80.23	78.01	97.23%
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)	64.16	64.85	101.08%
			Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	29.53%	26.04%	88.18%
			Proporsi Rumah Tanggga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	39.20%	38.75%	98.85%
		Kegiatan : Pengelolaan Sampah	Jumlah Sampah yang di Olah	57.323 Ton/Tahun	53.982 Ton/Tahun	95.15%
		Sub Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	8 kelompok	111 Kelompok	1387.50%
		Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	370 Unit	370 Unit	100.00%

No .	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
		Sub Kegiatan : Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA TPST kabupaten kota atau TPA TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	71175 Ton	72.271 Ton	160.91%
		Sub Kegiatan : Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (54750 Ton)	54750 Ton	53.060,29 Ton	99.62%
		PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengelolaan Limbah B3 yang Memenuhi Ketentuan	100%	100%	100.00%
		Kegiatan : Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase kegiatan penyimpanan Limbah B3 yang memenuhi ketentuan	100%	100%	100.00%
		Sub Kegiatan : Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	20 Laporan	20 Laporan	100.00%

No .	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Kegiatan: Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencemaran Udara	59.50%	47.06%	126.43%
			Persentase Pencemaran Air	54%	15.38%	351.11%
			Persentase Lahan Kritis	27.94%	27.94%	100.00%
			Jumlah titik pantau kualitas udara yang sesuai dengan baku mutu	6 Titik	9 Titik	150.00%
			Jumlah titik pantau kualitas air yang sesuai dengan baku mutu	51 Titik	66 Titik	129.41%
		Sub Kegiatan: Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	110 Dokumen	110 Dokumen	100.00%
		Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%
		Sub Kegiatan: Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%
		Sub Kegiatan: Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	1 Lokasi	1 Lokasi	100.00%

No .	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
		Sub Kegiatan: Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%
		Kegiatan: Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luasan Lahan kritis yang tertangani	10 Ha	14.5 Ha	145.00%
		Sub Kegiatan : Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	10 Ha	14.5 Ha	145.00%
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam Rangka PPLH	48 Lembaga	51 Lembaga	106.25%
		Kegiatan : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	48 Entitas	51 Entitas	106.25%
		Sub Kegiatan : Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	48 Entitas	51 Entitas	106.25%

No .	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	29.23%	8.59%	29.40%
		Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Persetujuan lingkungan dan/atau persetujuan teknis yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	100%	100%	100.00%
		Sub Kegiatan : Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	130 Usaha/Kegiatan	67 Pelaku Usaha	51.54%
		Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	5 Dokumen	22 Dokumen	440.00%
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas Kawasan KEHATI yang Dikelola	9 Ha	9 Ha	100.00%

No .	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
		Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Luas RTH Kabupaten	3.1 Ha	3.1 Ha	100.00%
		Sub Kegiatan : Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah sarana dan prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	2 Unit	2 Unit	100.00%
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Lingkungan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100.00%
		Kegiatan : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	25 Pengaduan	15 Pengaduan	60.00%
		Sub Kegiatan : Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	25 Pengaduan	15 Pengaduan	60.00%
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Relawan Lingkungan Hidup yang Meningkatkan Kompetensinya	4.17%	4.17%	100.00%
		Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah relawan lingkungan hidup yang diberikan pembinaan	130 Relawan	130 Relawan	100.00%

No .	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
		Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	5 Lembaga	5 Lembaga	100.00%
		Sub Kegiatan : Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%
2	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah dan Kualitas Pelayanan Jalan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	74.8	76.7	102.54%
			Tingkat pelayanan jalan (LoS)	100%	100%	100.00%
			VC Ratio rata2	0.28 Ratio	0.32 Rasio	87.50%
		Kegiatan : Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase wilayah tertib parkir	85%	86.02%	101.20%

No .	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
		Sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100.00%
		Kegiatan : Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Laik Jalan	99.63%	99.05%	99.42%
		Sub kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Laporan	12 Laporan	100.00%
		Sub kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersedia	18 Unit	18 Unit	100.00%
		Sub kegiatan : Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar	8000 Unit	7.878 Unit	98.48%
		Sub kegiatan : Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	1300 Dokumen	700 Dokumen	53.85%
		Sub kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	18 Unit	18 Unit	100.00%

No .	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
		Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rasio jalan yang tercukupi APJ	45%	45.30%	100.67%
		Sub kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	5300 Unit	7263 Unit	137.04%
		Sub kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2140 Unit	2221 Unit	103.79%
		Sub kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	16 Unit	16 Unit	100.00%
		Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase trayek angkutan umum yang aktif	78%	83.33%	106.83%
		Sub kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	90 Unit	90 Unit	100.00%
		Kegiatan : Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	jumlah kendaraan yang terlibat laka lantas tahun N	1083 Unit	2045 Unit	52.96%

No .	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
		Sub kegiatan : Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12 Laporan	12 Laporan	100.00%
		Sub kegiatan : Pengadaan dan Pemasangan Alat Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%
		Sub kegiatan : Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun	2 Unit	2 Unit	100.00%
		Sub kegiatan : Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100.00%
		Sub kegiatan : Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100.00%
		Kegiatan : Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang ditetapkan	1 Dokumen	3 Dokumen	300.00%
		Sub kegiatan : Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3 Dokumen	300.00%

No .	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
		Sub kegiatan : Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00%
		Kegiatan : Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Andalalin yang terselesaikan	100%	100%	100.00%
		Sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	4 Laporan	13 Laporan	325.00%
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Kapal yang Memiliki Pas Kapal	83.42%	83.52%	100.12%
		Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pas Kapal yang Terbit tepat waktu	83.42%	83.52%	100.12%
		Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	50 Dokumen	69 Dokumen	138.00%
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	91.6	91.5	99.89%

No .	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	82.7	82.85	100.18%
		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	9 Dokumen	9 Dokumen	100.00%
		Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	150.00%
		Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan hasil Evaluasi Kinerja yang tersusun	7 Laporan	7 Laporan	100.00%
		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Jenis	9 Jenis	100.00%
		Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan	182 Orang	184 Orang	101.10%
		Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%
		Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	90 Dokumen	90 Dokumen	100.00%
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	100.00%

No .	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	100.00%
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	23 Laporan	23 Laporan	100.00%
		Sub Kegiatan : Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00%
		Kegiatan : Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Kepegawaian	1 Jenis	1 Jenis	100.00%
		Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	100.00%
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	4 Jenis	4 Jenis	100.00%
		Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100.00%

No .	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100.00%
		Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.00%
		Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100.00%
		Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	36 Dokumen	36 Dokumen	100.00%
		Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	29 Laporan	72.50%
		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Negara	2 Jenis	2 Jenis	100.00%
		Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100.00%
		Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	100.00%
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	2 Jenis	2 Jenis	100.00%

No .	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100.00%
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00%
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00%
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	4 Jenis	4 Jenis	100.00%
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	50 Unit	100.00%
		Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	100.00%
		Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	100.00%
		Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	100.00%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa hampir semua indikator kinerja dapat mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian Indikator dari sasaran strategis yang melampaui target tak terlepas dari program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan.

3.1.2 Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Selain membandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun yang sama, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi kinerja yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Realisasi		
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	8	8	8
1.	Meningkatkan kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara 3. Indeks Tutupan Lahan	1. Indeks Kualitas Air 75.29 2. Indeks Kualitas Udara 80.23 3. Indeks Tutupan Lahan 64.16	1. Indeks Kualitas Air 75.85 2. Indeks Kualitas Udara 78.01 3. Indeks Tutupan Lahan 64.85	56.34 82.35 50.20	59.76 86.99 50.92	58.72 89.89 51.39
2.	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah dan Kualitas Pelayanan Jalan	1. Rasio Konektivitas Kab/Kota 2. Tingkat pelayanan jalan (LoS)	1. Rasio Konektivitas Kab/Kota 74.8 2. Tingkat pelayanan jalan (LoS) 100%	1. Rasio Konektivitas Kab/Kota 76.7 2. Tingkat pelayanan jalan (LoS) 100%	68.92 92%	68.92 100%	72.8 100%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Realisasi		
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	8	8	8
3.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (91.6)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (91.5)	90.25	90.66	91.4

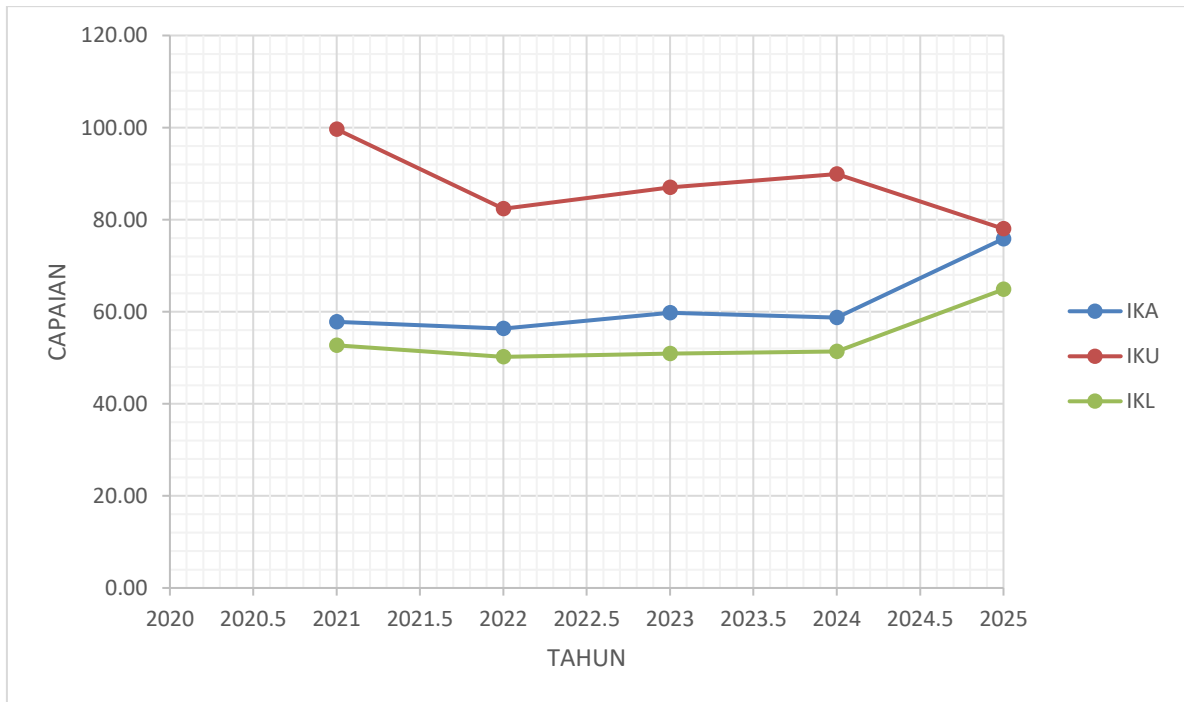
*perhitungan sebelum tahun 2025 menggunakan metode lama

Sasaran strategis urusan lingkungan hidup yaitu Meningkatkan kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan Tahun 2025 kurang relevan jika dibandingkan dengan tahun 2022, 2023, dan 2024. Hal ini disebabkan dimulai dari Tahun 2025 ditetapkan perhitungan menggunakan metode baru dalam menghitung Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Lahan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Dapat dilihat dari tabel diatas, untuk Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Lahan jika dilihat dari target Tahun 2025 telah terlampaui sedangkan untuk Indeks Kualitas Udara belum mencapai target. Hal ini disebabkan adanya penambahan parameter PM2,5 dalam perhitungan Indeks Kualitas Udara dimana titik sampling yang diambil untuk parameter tersebut belum mewakili lokasi peruntukan pengambilan sampling udara sehingga belum mewakili Kualitas Udara di Kabupaten Tuban.

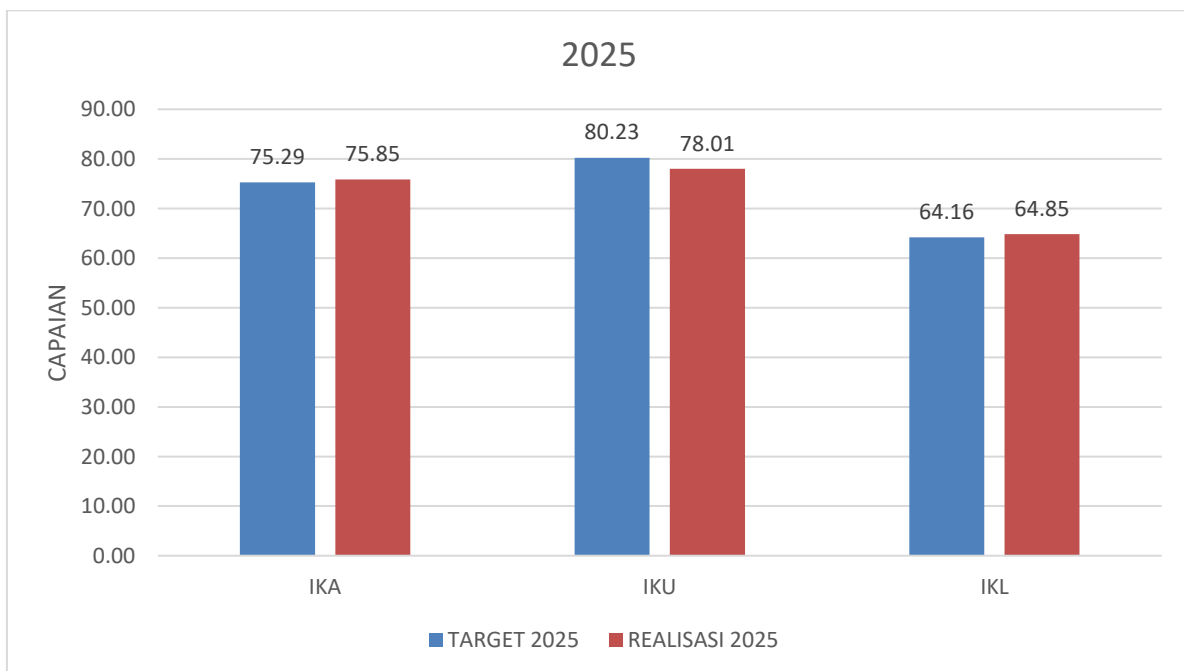
Untuk sasaran strategis urusan perhubungan Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah dan Kualitas Pelayanan Jalan dengan indikator Rasio Konektivitas Kab/Kota dan Tingkat Pelayanan Jalan (*LoS*) dari tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Hal ini sebagai bukti bahwa peningkatan infrastruktur perhubungan menjadi salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Tuban.

Sedangkan untuk sasaran strategis lainnya yaitu Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan belum mencapai target kinerja, namun jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Ini menunjukkan sebagai penyelenggara pelayanan, kepuasan masyarakat atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan semakin meningkat. Adapun secara grafik capaian Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan dari tahun sebelumnya bisa dilihat dari gambar dibawah.

Grafik Indikator Urusan Lingkungan Hidup



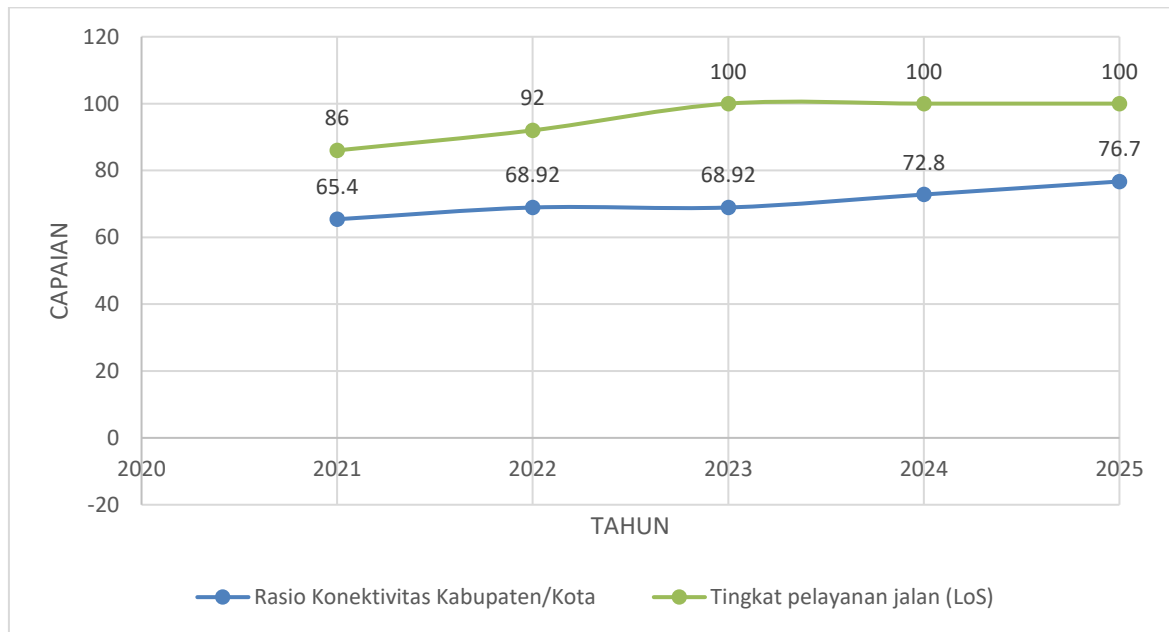
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun sebelumnya



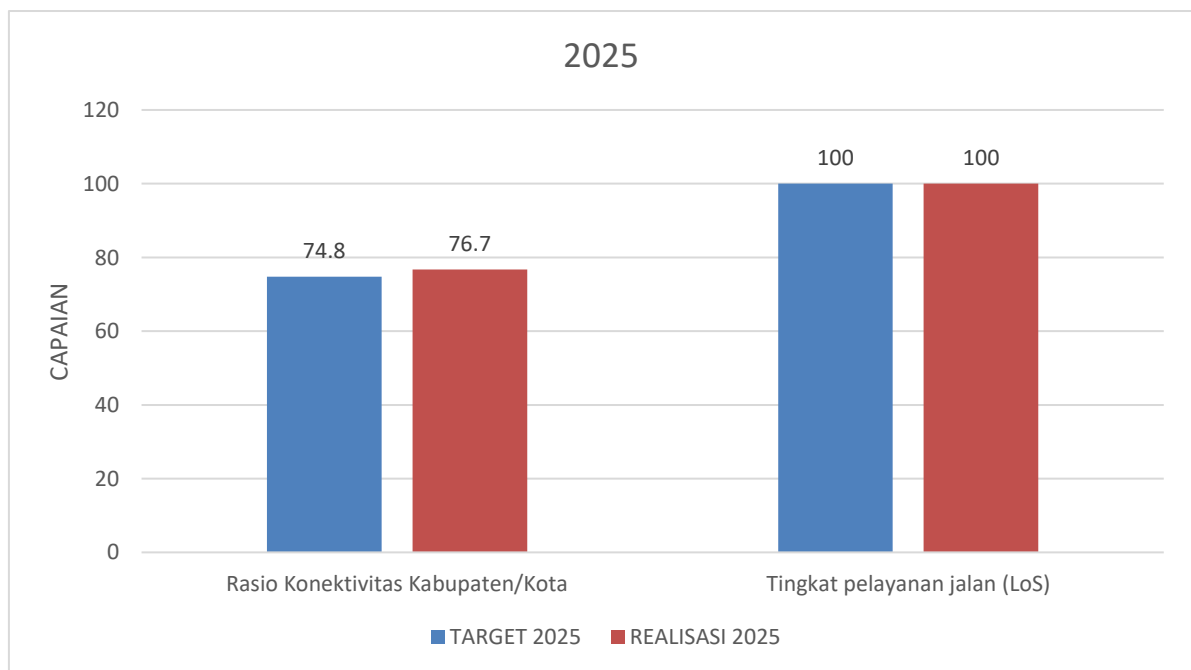
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target

*Berdasarkan NOMOR: BA-16/SETPPKL/PEHKT/REN.2.4/B/04/2024, mulai tahun 2025 terdapat perubahan metode pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan komponennya IKA, IKU, IKL

Grafik Indikator Urusan Perhubungan

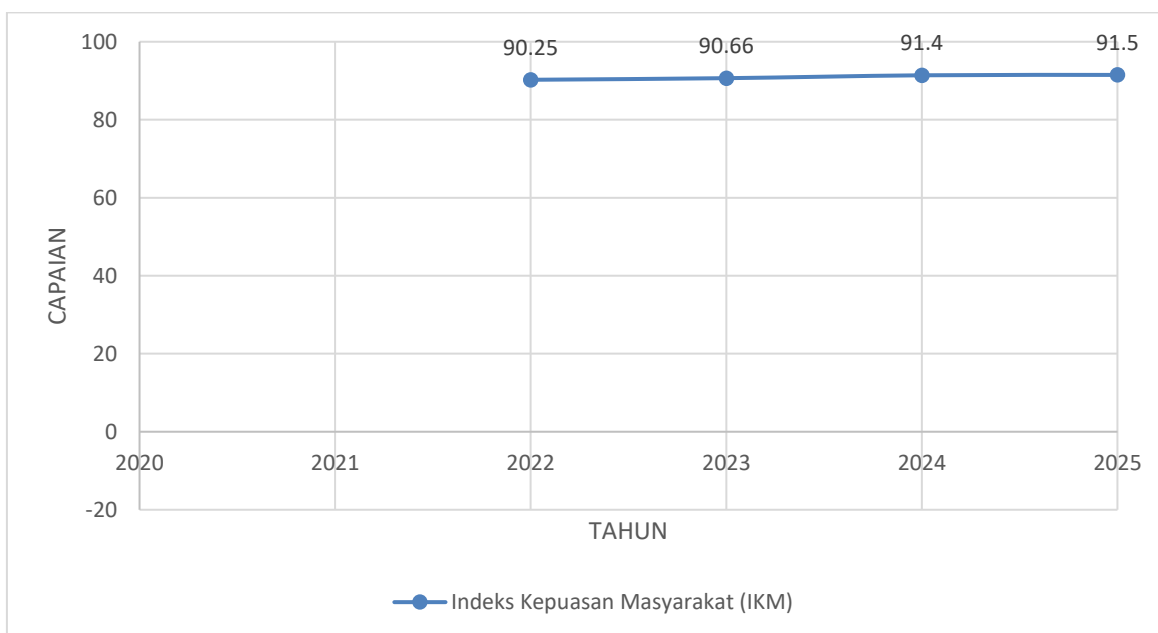


Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun sebelumnya

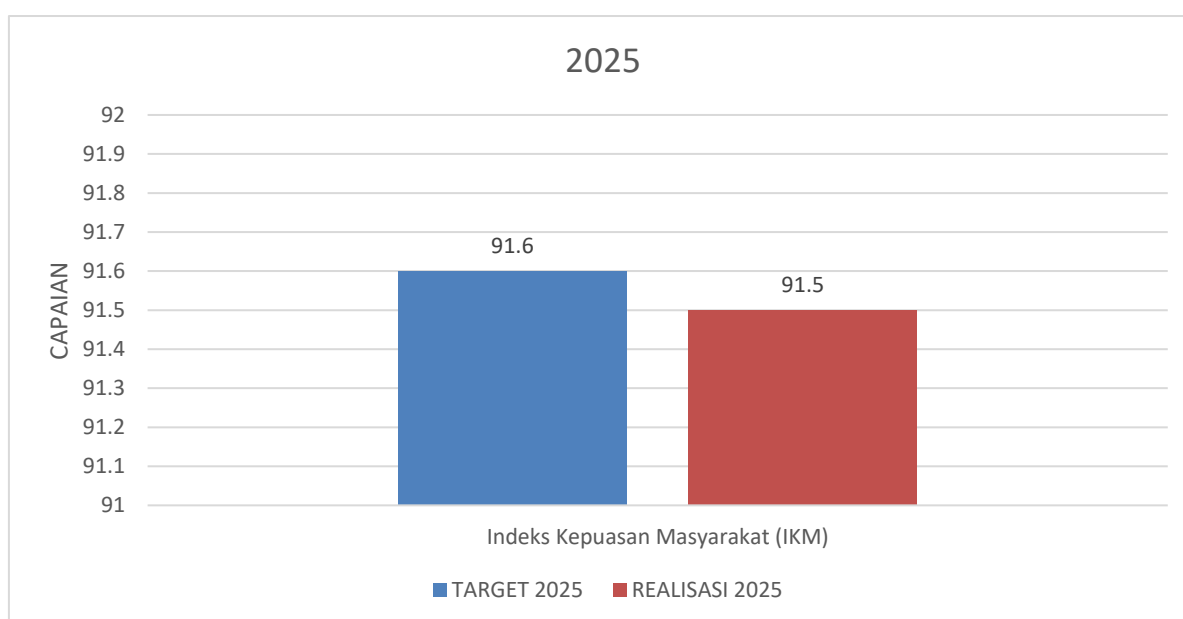


Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target

Grafik Urusan Penunjang



Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun sebelumnya



Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target

3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (Target Akhir Renstra)

Perencanaan strategis sebagaimana telah dijelaskan di Bab II, bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Sangat penting membandingkan realisasi kinerja pada tahun ini dengan target yang ditetapkan dalam rencana strategis. Hal ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana perkembangan organisasi dalam mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi dari kepala daerah. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan akhir Renstra / RPJMD 2025-2029.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir 2030	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
Indikator kinerja sasaran urusan lingkungan hidup (IKA,IKU dan IKL)					
1.	Meningkatkan kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	1. Indek Kualitas Air 2. Indek Kualitas Udara 3. Indek Tutupan Lahan	1. Indek Kualitas Air 75.73 2. Indek Kualitas Udara 80.71 3. Indek Tutupan Lahan 64.32	1. Indek Kualitas Air 75.85 2. Indek Kualitas Udara 78.01 3. Indek Tutupan Lahan 64.85	1. 100.16% 2. 96.65% 3. 100.82%
Indikator kinerja sasaran urusan perhubungan					
2.	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah dan Kualitas Pelayanan Jalan	1. Rasio Konektivitas Kab/Kota 2. Tingkat pelayanan jalan (LoS)	1. Rasio Konektivitas Kab/Kota 84.8 2. Tingkat pelayanan jalan (LoS) 100%	1. Rasio Konektivitas Kab/Kota 76.7 2. Tingkat pelayanan jalan (LoS) 100%	1. 90.45% 2. 100%
Indikator kinerja sasaran urusan penunjang					
3.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat (92.6)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat (91.4)	98.70%

Dari tabel diatas, dapat dilihat untuk capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan mencapai target yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra. Bahkan ada beberapa indikator kinerja yang melampaui target akhir Renstra. Selaras dengan capaian kinerja yang telah melampaui target Renstra, akan evaluasi kembali terkait pertimbangan penetapan target kinerja di tahun-tahun berikutnya.

3.1.4 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan organisasi lain

1. Urusan Lingkungan Hidup

Indikator	Capaian Kinerja	
	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Provinsi Jawa Timur
Indeks Kualitas Udara (IKU)	78.01	74.45
Indeks Kualitas Air (IKA)	75.85	73.07
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	64.85	63.97

Dapat dilihat dari tabel diatas, capaian kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) diatas capaian kinerja Provinsi. Hal ini akan menjadi fokus Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan untuk tahun-tahun mendatang adalah terus meningkatkan kinerja sehingga Kabupaten Tuban dapat memberikan sumbangsih yang positif untuk kinerja pada tingkat provinsi.

2. Urusan Perhubungan

Indikator	Capaian Kinerja	
	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Organisasi Lain
Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	76.7	76.3 (Nasional)
Tingkat pelayanan jalan (LoS)	100%	-

Dari tabel diatas, capaian Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan untuk indikator Rasio Konektivitas lebih baik dibandingkan rasio konektivitas nasional. Hal ini menggambarkan adanya konektivitas transportasi antar daerah di Kabupaten Tuban dalam sisi transprotasi. Hal-hal yang akan dilakukan untuk perbaikan kedepannya dalam meningkatkan rasio konektivitas Kabupaten Tuban adalah mengevaluasi kembali kebutuhan trayek di Kabupaten Tuban dan memaksimalkan pelayanan rute trayek yang

sudah ditetapkan serta menyediakan sarana dan prasarana untuk akses transportasi sehingga dapat mencapai target kinerja pada periode Renstra sebesar 84.8 pada Tahun 2030. Sementara Tingkat pelayanan jalan (LoS) belum bisa diperbandingkan dengan daerah lain dikarenakan masing-masing daerah menetapkan indikator yang berbeda sesuai dengan keadaan dan kebutuhan wilayahnya masing-masing.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan tersebut antara lain:

1) Indeks Kualitas Air (IKA)

Tercapainya Indeks Kualitas Air (IKA) dalam urusan lingkungan hidup, hal ini dipengaruhi oleh:

- a. monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap aktivitas perusahaan yang menghasilkan limbah cair;
- b. Meningkatnya ketaatan perusahaan penghasil limbah cair;
- c. Meningkatnya jumlah komunitas peduli lingkungan/keompok masyarakat yang concern terhadap kualitas air sungai/sampah di sungai..

Untuk mempertahankan kualitas air hal yang akan dilakukan:

1. Pemantauan, monitoring dan evaluasi berkelanjutan pada badan air yang dilaksanakan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
2. Penerbitan ijin lingkungan dan pengawasan untuk meningkatkan ketaatan usaha penghasil limbah cair melalui Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan penanganan atas pengaduan lingkungan hidup yang berpotensi mencemari badan air melalui Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
3. Meminimalisir buangan limbah domestik ke badan air melalui Program Pengelolaan Persampahan; dan
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
5. Meningkatkan kegiatan konservasi pada sekitaran area mata air untuk menjaga debit air.

2) Indeks Kualitas Udara (IKU)

Tidak tercapainya Indeks Kualitas Udara (IKU) dalam urusan lingkungan hidup dikarenakan adanya penambahan parameter PM2.5 dimana alat yang mengukur PM2.5 ini belum ada semua di titik uji yang diperuntukkan untuk mengukur kualitas udara sehingga belum mewakili kualitas udara di Kabupaten Tuban. Untuk menjaga kualitas udara supaya lebih baik, akan dilakukan dengan:

- a. Meningkatkan pengawasan dan/atau monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap aktivitas perusahaan yang berpotensi penghasil polusi udara;
- b. Ketaatan perusahaan yang berpotensi penghasil polusi udara melalui penerapan teknologi;
- c. Uji Emisi Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- d. Penyediaan Transportasi Publik;
- e. Meningkatkan kegiatan gemar bersepeda (*gowes*) dan pelaksanaan *Car Free Day* yang membudaya sebagai bagian dari pengurangan penggunaan kendaraan bermotor dalam aktivitas sehari-hari.

3) Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Tercapainya Indeks Kualitas Lahan (IKL) dalam urusan lingkungan hidup dipengaruhi oleh:

- a. Penanaman dan penghijauan yang dilahan terbuka di wilayah Kabupaten Tuban yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik swasta/perusahaan, kelompok masyarakat dan pemerintah;
- b. Ketaatan perusahaan dalam penyediaan Ruang terbuka Hijau di masing-masing lokasi/tapak kegiatan sesuai yang diamanatkan dalam dokumen lingkungan;
- c. Pembaruan data Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan melakukan *deleniasi* RTH dan *update* data pada *website* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang

dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban.

4) Rasio Konektivitas

Tercapainya Rasio Konektivitas Kabupaten Tuban, hal ini didukung dengan kerjasama yang baik antara Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan dengan pihak-pihak terkait untuk penyediaan angkutan sesuai dengan trayek yang telah ditetapkan.

5) Tingkat Pelayanan Jalan

Tercapainya Tingkat Pelayanan Jalan, hal ini didukung oleh adanya kegiatan:

- a. Penetapan Rencana Induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- b. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
- c. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota
- d. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota.

Tabel Capaian Kinerja, Analisa, Permasalahan dan Solusi

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Satuan	Data Base Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Akhir Tahun 2025	Tercapai / tidak tercapai	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Alternatif Solusi dan Tindak Lanjut	
										Alternatif Solusi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatkan kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	$IKA\ Kab./Kota = \frac{\sum IKA\ Titik\ Pantau_i}{Jumlah\ Titik\ Pantau}$	--	58.72	75.29	75.85	Tercapai	Uji kualitas air yang dilakukan menunjukkan kualitas air di Kabupaten Tuban mayoritas dalam kondisi baik	Pemantauan, pengawasan dan monitoring berkelanjutan pada badan air dan ketaatan usaha penghasil limbah cair membuat kualitas air tetap terjaga	- Mengupayakan adanya tempat penampungan sampah berfokus pada desa serta meningkatkan sarpras persampahan hingga menjangkau level desa - Upaya edukasi pengelolaan sampah/limbah dari sumber penghasil baik di level masyarakat maupun di tingkat rumah tangga. -
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,99} (I_{INA} - 0,01) \right)$	--	89.89	80.23	78.01	Tidak tercapai	Alat AQMS terpasang bukan pada peruntukan sampling Udara Pada lokasi peruntukan sampling udara tidak terdapat alat yang mengukur parameter	• Melakukan sinkronisasi dengan KLH dan DLH Propinsi mengenai ketercapaian Indeks Kualitas Udara • Melaksanakan pengawasan terhadap pelaku usaha yang	• Mengusulkan peningkatan sarpras uji laboratorium khususnya alat yang bias mengukur parameter PM2.5 pada titik peruntukan sampling udara • Penambahan titik-titik car free day dan passive

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Satuan	Data Base Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Akhir Tahun 2025	Tercapai / tidak tercapai	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Alternatif Solusi dan Tindak Lanjut	
										Alternatif Solusi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									PM2.5 sehingga menggunakan data AQMS yang belum mencerminkan Kualitas Udara Kabupaten Tuban	- berpotensi melakukan pencemaran udara - Pengujian kendaraan bermotor yang dijalankan untuk mengurangi emisi - Penyediaan transportasi publik untuk menekan gas buang kendaraan	sampler serta pemenuhan angkutan public yang aman dan nyaman
		Indeks Kualitas lahan (IKL)	$IKL = IKTL + \text{Faktor Koreksi Gambut}$ $IKTL = 100 - [84,3 - (TL \times 100)] \times \frac{50}{54,3}$ $TL = \frac{\sum_{i=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan } i \times C_i)}{\sum_{i=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan } i)}$	--	51.39	64.16	64.85	Tercapai	- Giat penanaman rutin dilakukan - Deleniasi RTH dan Update data pada website KHLK sehingga citra RTH Kab. Tuban yang didapati oleh KLHK luasannya meningkat	- Giat penanaman rutin dilakukan - Deleniasi RTH dan Update data pada website KHLK sehingga citra RTH Kab. Tuban yang didapati oleh KLHK luasannya meningkat	Menekankan pada semua pihak agar dalam kegiatan penanaman juga diikuti dengan kegiatan pemeliharaan.
2.	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah dan	Rasio Konektivitas Kab/Kota	Rasio konektivitas Kabupaten atau Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	-	72.8	74.8	76.7	Tercapai	kerjasama yang baik antara Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Peningkatan jumlah trayek yang aktif untuk meningkatkan	Meningkatkan kembali antusias masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dengan cara

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Satuan	Data Base Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Akhir Tahun 2025	Tercapai / tidak tercapai	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Alternatif Solusi dan Tindak Lanjut	
										Alternatif Solusi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kualitas Pelayanan Jalan								dengan pihak-pihak terkait untuk penyediaan angkutan sesuai dengan trayek yang telah ditetapkan	n rasio konektivitas	mengalokasikan anggaran untuk angkutan gratis, dan sosialisasi keuntungan angkutan umum massal
		Tingkat pelayanan jalan (LoS)	Presentase panjang ruas jalan dengan nilai tingkat pelayanan jalan diatas D/lancar(Jumlah panjang ruas jalan dengan LoS diatas D dibagi total panjang jalan x 100%)	%	100%	100%	100%	Tercapai	Penataan lalu lintas, penyediaan sarpras penunjangnya ,penataan parkir liat dan kegiatan lain berjalan optimal	Penataan lalu lintas, penyediaan sarpras penunjangnya a,penataan parkir liat dan kegiatan lain berjalan optimal	Bekerjasama dengan pihak terkait untuk penegakan terhadap parkir liar Melakukan sosialisasi dan event yang berkaitan untuk meningkatkan kesadaran dalam berlalu lintas

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		ANGGARAN	% ANGGARAN
1	2	3		4	5
1	Meningkatkan kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	1	Indeks Kualitas Air	31,389,001,070.71	23.20%
		2	Indeks Kualitas Udara		
		3	Indeks Tutupan Lahan		
2	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah dan Kualitas Pelayanan Jalan	1	Rasio Konektivitas Kab/Kota	78,912,102,840.50	58.32%
		2	Tingkat pelayanan jalan (LoS)		
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	25,006,085,173.00	18.48%
Total				135,307,189,084.21	

Tabel Efisiensi Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Tahun 2025

No.	Sasaran / Program		Kinerja			Anggaran				Tingkat Efisiensi
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan		Indeks Kualitas Air (IKA)	75.29	75.85	100.74%	31,389,001,070.71	28,577,210,541.00	91.04%	8.64%
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	80.23	78.01	97.23%				
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)	64.16	64.85	101.08%				
	A.	Program Pengelolaan Persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	29.53%	26.04%	88.18%	27,968,193,600.00	25,310,093,605.00	90.50%	3.02%
			Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	39.20%	38.75%	98.85%				
	B.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pengelolaan Limbah B3 yang Memenuhi Ketentuan	100%	100%	100.00%	23,095,027.50	21,097,900.00	91.35%	8.65%
	C.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pencemaran Udara	59.50%	47.06%	126.43%	2,310,704,359.81	2,224,177,715.00	96.26%	96.26%
			Persentase Pencemaran Air	54%	15.38%	351.11%				
			Persentase Lahan Kritis	27.94%	27.94%	100.00%				
	D.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam Rangka PPLH	48 Lembaga	51 Lembaga	106.25%	702,324,165.00	671,374,785.00	95.59%	10.66%

No.	Sasaran / Program		Kinerja			Anggaran				Tingkat Efisiensi
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	E.	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	29.23%	8.59%	29.40%	113,198,158.40	112,326,386.00	99.23%	69.83%
	F.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Luas Kawasan KEHATI yang Dikelola	9 Ha	9 Ha	100.00%	127,551,600.00	123,663,690.00	96.95%	3.05%
	G.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Lingkungan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100.00%	44,227,910.00	39,263,250.00	88.77%	11.23%
	H.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Relawan Lingkungan Hidup yang Meningkatkan Kompetensinya	4.17%	4.17%	100.00%	99,706,250.00	75,213,210.00	75.43%	24.57%
2	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah dan Kualitas Pelayanan Jalan		Rasio Konektivitas Kab/Kota	74.8	76.7	102.54%	78,912,102,840.50	67,440,154,857.72	85.46%	15.81%
			Tingkat pelayanan jalan (LoS)	100%	100%	100.00%				
	I.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	VC Ratio rata2	0.28 Ratio	0.32 Rasio	87.50%	78,876,483,840.50	67,405,904,357.72	85.46%	2.04%
	J.	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Kapal yang Memiliki Pas Kapal	83.42%	83.52%	100.12%	35,619,000.00	34,250,500.00	96.16%	3.96%
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	91.6	91.5	99.89%	25,006,085,173.00	20,610,782,949.00	82.42%	17.47%
	K.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	82.7	82.85	100.18%	25,006,085,173.00	20,610,782,949.00	82.42%	17.76%
Rata-rata						109.48%			86.20%	

No.	Sasaran / Program	Kinerja			Anggaran			%Capaian	Tingkat Efisiensi
		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									- 23.28%

Efisiensi dapat dilihat dari perbandingan antara hasil yang dengan sumber daya dikeluarkan. Dapat dilihat dari tabel diatas, hanya pada Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) perbandingan antara sumber daya yang dikeluarkan belum sebanding dengan hasil kinerja. Namun demikian, mayoritas capaian program pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan tercapai dengan capaian rata-rata 109.48%, sedangkan untuk realisasi anggaran rata-rata berada pada angka 86.20%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran atas capaian kinerja Program pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan. Beberapa hal yang menunjang efisiensi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan:

1. Kerja sama yang baik semua pihak dalam pengelolaan lingkungan hidup dan perhubungan, antara lain dengan semakin banyaknya kelompok masyarakat yang perhatian dengan kondisi lingkungan, kesadaran pelaku usaha untuk meminimalisir pencemaran lingkungan, penyediaan area hijau yang dilakukan oleh swasta, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, penyediaan perlengkapan jalan oleh pelaku usaha disekitar lokasi usahanya, operasional angkutan oleh pihak swasta pada trayek yang telah ditetapkan dan lain sebagainya.
2. Negosiasi harga dilakukan untuk pengadaan baik secara tender maupun pengadaan langsung serta pembelian langsung dilakukan dengan harga dibawa standar satuan harga pada dokumen anggaran. Hal ini membuat adanya penghematan anggaran namun hasil yang dicapai sama dengan apa yang diharapkan.

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Dari 5 Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, 4 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan melampaui target yang telah ditetapkan, Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Lahan (IKL), Rasio Konektivitas Kab/Kota, Rasio Jalan dengan standar APJ Lengkap dan Tingkat Pelayanan Jalan. Sedangkan untuk Indeks Kualitas Udara (IKU) mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan target. Hal ini disebabkan adanya penambahan parameter PM2.5 dimana alat yang mengukur PM2.5 ini belum ada di semua titik uji yang diperuntukkan untuk mengukur kualitas udara sehingga belum mencerminkan kualitas udara di Kabupaten Tuban. Untuk menjaga kualitas udara supaya lebih baik, akan dilakukan dengan:

- a. Meningkatkan pengawasan dan/atau monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap aktivitas perusahaan yang berpotensi penghasil polusi udara;
- b. Ketaatan perusahaan yang berpotensi penghasil polusi udara melalui penerapan teknologi;
- c. Pemenuhan fasilitas persampahan untuk mengurangi pembakaran sampah;
- d. Uji Emisi Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- e. Penyediaan Transportasi Publik;
- f. Meningkatkan kegiatan gemar bersepeda (*gowes*) dan pelaksanaan *Car Free Day* yang membudaya sebagai bagian dari pengurangan penggunaan kendaraan bermotor dalam aktivitas sehari-hari.

Sementara itu, keberhasilan tercapainya kinerja yang lain tak lepas dari Program Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan yang telah dijalankan, diantaranya:

- a. Indeks Kualitas Air (IKA)

Tercapainya Kinerja atas Indeks Kualitas Udara didukung oleh:

1. Pemantauan, monitoring dan evaluasi berkelanjutan pada kualitas air yang dilaksanakan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 2. Penerbitan ijin lingkungan dan pengawasan untuk meningkatkan ketaatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran air melalui Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 3. Konservasi mata air dengan melakukan penanaman melalui Program Keanekaragaman Hayati
 4. Meminimalisir pembuangan sampah pada badan air melalui Program Pengelolaan Persampahan.
- b. Indeks Kualitas Lahan (IKL)
- Tercapainya Kinerja atas Indeks Kualitas Lahan didukung oleh:
1. Penanaman dan Penghijauan serta deleniaasi ruang terbuka hijau yang dilakukan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI); dan
 2. Mensyaratkan penyediaan lahan terbuka hijau bagi pelaku usaha yang mengajukan perijinan lingkungan pada Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- c. Rasio Konektivitas Kab/Kota
- Tercapainya Rasio Konektivitas Kabupaten Kota didukung oleh penyediaan angkutan sesuai dengan trayek yang telah ditetapkan pada Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) khususnya Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Tingkat pelayanan jalan (LoS)
- Tercapainya Tingkat Pelayanan Jalan (LoS) didukung oleh perencanaan dan kinerja yang optimal untuk mengurai ruas jalan dalam kondisi yang kurang lancar menjadi lancar, diantaranya dengan menetapkan

kebijakan berlalu lintas, melakukan manajemen rekayasa lalu lintas, penyediaan parkir sehingga tidak mengganggu kelancaran lalu lintas, dan sosialisasi keselamatan berlalu lintas melalui Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Selanjutnya Hal yang menjadi fokus kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan untuk tahun-tahun berikutnya adalah menjaga kinerja yang sudah baik dan juga meningkatkan kinerja yang masih belum mencapai hasil yang memuaskan dengan menguraikan permasalahan yang menghambat kinerja dan berupaya mencari solusi yang terbaik.

Lebih jelas mengenai program dan kegiatan pendukung/penghambat keberhasilan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan tersaji pada tabel berikut:

Sasaran	Indikator	Program Unggulan	Alasan mengapa program/kegiatan tersebut menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian/Inovasi
Meningkatkan kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)		
	Indeks Kualitas Udara (IKU)		
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)		
		Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan sampah yang baik dapat mengurangi beban cemar air akibat buangan limbah ke badan air dan juga mengurangi cemaran udara akibat pembakaran sampah
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Identifikasi area yang tercemar, monitoring area untuk menentukan area yang kritis/tercemar dan Rehabilitasi area yang kritis dilaksanakan melalui program ini
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan area hijau, konservasi mata air dan pengelolaan kehati sangat penting untuk kualitas lingkungan hidup
Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah dan Kualitas Pelayanan Jalan	Rasio Konektivitas Kab/Kota	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Konektivitas wilayah tidak terlepas dari penyediaan angkutan publik yang dilaksanakan di program ini
	Tingkat pelayanan jalan (LoS)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan kebijakan berlalu lintas, Pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas, penyediaan parkir sehingga tidak mengganggu kelancaran lalu lintas, dan sosialisasi keselamatan berlalu lintas yang mendukung Pelayanan Jalan dilaksanakan melalui Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

3.2 REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban, melalui 11 (sebelas) program dan 62 (enam puluh dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 135,307,189,084.21 dan terealisasi sebesar Rp. 116,628,148,347.72 atau 86.20%, dengan rincian penggunaan anggaran sebagaimana tabel berikut:

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25,006,085,173.00	20,610,782,949.00	82.42%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	107,212,168.00	101,945,500.00	95.09%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72,926,168.00	71,524,500.00	98.08%
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34,286,000.00	30,421,000.00	88.73%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21,676,493,672.00	17,957,885,596.00	82.84%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21,581,333,672.00	17,864,334,096.00	82.78%
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	82,248,500.00	80,713,500.00	98.13%
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2,195,000.00	2,191,000.00	99.82%
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2,195,000.00	2,164,500.00	98.61%
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,131,500.00	4,100,500.00	99.25%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2,195,000.00	2,191,000.00	99.82%
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2,195,000.00	2,191,000.00	99.82%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	976,000.00	950,000.00	97.34%
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	976,000.00	950,000.00	97.34%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	346,083,117.00	312,154,284.00	90.20%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29,250,109.00	28,964,500.00	99.02%

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	109,998,408.00	101,922,285.00	92.66%
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	101,067,700.00	99,995,000.00	98.94%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45,506,400.00	26,335,200.00	57.87%
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13,180,500.00	13,095,000.00	99.35%
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47,080,000.00	41,842,299.00	88.87%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	509,836,671.00	123,652,890.00	24.25%
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	383,324,320.00	0.00	0.00%
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	126,512,351.00	123,652,890.00	97.74%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,706,966,944.00	1,473,744,719.00	86.34%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	363,997,000.00	334,121,152.00	91.79%
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39,524,300.00	39,470,882.00	99.86%
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,303,445,644.00	1,100,152,685.00	84.40%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	658,516,601.00	640,449,960.00	97.26%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	449,896,601.00	436,803,460.00	97.09%
2	Pemeliharaan Mebel	18,000,000.00	15,012,500.00	83.40%
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24,530,000.00	22,668,000.00	92.41%
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	166,090,000.00	165,966,000.00	99.93%
B	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2,310,704,359.81	2,224,177,715.00	96.26%
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1,476,506,647.81	1,392,410,115.00	94.30%

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	579,719,016.00	574,578,000.00	99.11%
2	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	163,560,000.00	163,259,000.00	99.82%
3	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	42,815,000.00	32,127,000.00	75.04%
4	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	71,661,196.00	68,685,000.00	95.85%
5	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	618,751,435.81	553,761,115.00	89.50%
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	834,197,712.00	831,767,600.00	99.71%
1	Pelaksanaan rehabilitasi	834,197,712.00	831,767,600.00	99.71%
C	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	127,551,600.00	123,663,690.00	96.95%
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	127,551,600.00	123,663,690.00	96.95%
1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	127,551,600.00	123,663,690.00	96.95%
D	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	23,095,027.50	21,097,900.00	91.35%
	Penyimpanan sementara Limbah B3	23,095,027.50	21,097,900.00	91.35%
1	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	23,095,027.50	21,097,900.00	91.35%
E	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	113,198,158.40	112,326,386.00	99.23%

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	113,198,158.40	112,326,386.00	99.23%
1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	55,927,697.60	55,802,461.00	99.78%
2	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	57,270,460.80	56,523,925.00	98.70%
F	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	99,706,250.00	75,213,210.00	75.43%
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99,706,250.00	75,213,210.00	75.43%
1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	62,249,950.00	44,888,450.00	72.11%
2	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	37,456,300.00	30,324,760.00	80.96%
G	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	702,324,165.00	671,374,785.00	95.59%
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	702,324,165.00	671,374,785.00	95.59%
1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	702,324,165.00	671,374,785.00	95.59%
H	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	44,227,910.00	39,263,250.00	88.77%

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	44,227,910.00	39,263,250.00	88.77%
1	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	44,227,910.00	39,263,250.00	88.77%
I	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	27,968,193,600.00	25,310,093,605.00	90.50%
	Pengelolaan Sampah	27,968,193,600.00	25,310,093,605.00	90.50%
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	63,110,000.00	55,020,100.00	87.18%
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	15,619,745,400.00	14,632,922,170.00	93.68%
3	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1,174,995,000.00	183,363,564.00	15.61%
4	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	11,110,343,200.00	10,438,787,771.00	93.96%
J	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	78,876,483,840.50	67,405,904,357.72	85.46%
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	343,364,936.00	333,195,000.00	97.04%
1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	287,869,000.00	285,135,000.00	99.05%
2	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	55,495,936.00	48,060,000.00	86.60%
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	58,887,859,444.00	52,853,428,246.00	89.75%
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	27,028,577,190.00	25,081,812,370.00	92.80%

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	42,136,924.00	41,913,431.00	99.47%
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	31,817,145,330.00	27,729,702,445.00	87.15%
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	5,330,823,464.50	5,253,471,944.65	98.55%
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	5,330,823,464.50	5,253,471,944.65	98.55%
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	691,732,888.00	668,939,000.00	96.70%
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	185,609,920.00	173,559,000.00	93.51%
2	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	104,680,000.00	98,097,000.00	93.71%
3	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	57,254,460.00	56,460,000.00	98.61%
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	286,448,958.00	283,125,500.00	98.84%
5	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	57,739,550.00	57,697,500.00	99.93%
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2,053,859,175.00	1,980,911,075.00	96.45%
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1,236,640,150.00	1,211,008,650.00	97.93%
2	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	452,282,650.00	418,285,228.00	92.48%
3	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	19,352,750.00	19,021,000.00	98.29%
4	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	323,000,000.00	316,986,697.00	98.14%
5	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	22,583,625.00	15,609,500.00	69.12%

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	8,410,000.00	6,848,000.00	81.43%
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	8,410,000.00	6,848,000.00	81.43%
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	11,560,433,933.00	6,309,111,092.07	54.58%
1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	11,560,433,933.00	6,309,111,092.07	54.58%
K	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	35,619,000.00	34,250,500.00	96.16%
	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	35,619,000.00	34,250,500.00	96.16%
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	35,619,000.00	34,250,500.00	96.16%
	TOTAL	135,307,189,084.21	116,628,148,347.72	86.20%

3.3 Strategi meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Konektivitas Antar Wilayah

Beberapa strategi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur perhubungan ke depan antara lain:

- 1) Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup melalui sosialisasi maupun perlombaan tentang lingkungan;
- 2) Pembagian bibit gratis bagi masyarakat yang berkenan untuk melakukan penanaman tanaman keras di tanah miliknya.
- 3) Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan terkait lingkungan hidup terutama untuk pelaku usaha yang berpotensi melakukan pencemaran lingkungan;
- 4) Pemerataan Infrastruktur Perhubungan;
- 5) Pengendalian Lalu Lintas dengan Penataan, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- 6) Menggalakkan transportasi massal dengan akses ke seluruh penjuru Kabupaten Tuban.

Strategi tersebut diatas darahkan pada kebijakan:

1. Penyelenggaraan penataan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kepedulian terhadap lingkungan serta menyelenggarakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang diwilayah Kabupaten Tuban;
2. Peningkatan kuantitas, kualitas infrastruktur perhubungan dan pelayanan transportasi.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas serta memperhatikan urutan kinerja yang ingin dicapai oleh OPD dikaitkan dengan kebutuhan struktural di dalam organisasi tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja sasaran urusan lingkungan hidup terhadap Indikator Kinerja Daerah (IKD) telah menunjukkan capaian yang cukup berarti, hal ini ditunjukkan oleh realisasi capaian Indeks Kualitas Air 75.85, Indeks Kualitas Udara 78.01 dan Indeks Kualitas Lahan 64.85 yang membuat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada di angka 74.32 dari target Tahun 2025 74.85 (99.29%), meski target 2025 tidak tercapai, angka capaian 2025 menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tuban sudah cukup baik.
2. Demikian juga capaian kinerja sasaran urusan perhubungan terhadap target kinerja 2024 juga menunjukkan capaian yang cukup berarti. Hal ini ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja melebihi target yang telah ditetapkan yaitu Rasio Konektivitas Kab/Kota 74.8 dari target 76.7 (102.54%), Tingkat pelayanan jalan (LoS) 100% dari target 100% (100%).

B. REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Meskipun mayoritas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan tercapai, masih ada beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain:

1. Masih adanya pembuangan limbah domestik dan limbah hasil usaha pada badan air menyebabkan terjadinya pencemaran air;
2. Pengelolaan Persampahan yang belum optimal dan kurangnya kesadaran masyarakat yang membuat sampah dibuang pada badan air dan/atau dibakar sehingga mencemari lingkungan;

3. Keterbatasan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan memungkinkan belum mewakili kualitas udara di Kabupaten Tuban;
4. Tingkat hidup tanaman hasil penanaman dan penghijauan sangat tergantung dengan kondisi alam;
5. Pada beberapa wilayah di Kabupaten Tuban, minim Alat Perlengkapan Jalan;
6. Masih dijumpai parkir liar yang mengganggu ketertiban lalu lintas; dan
7. Kurangnya minat masyarakat menggunakan layanan angkutan umum dan lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan ditahun-tahun mendatang beberapa hal yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

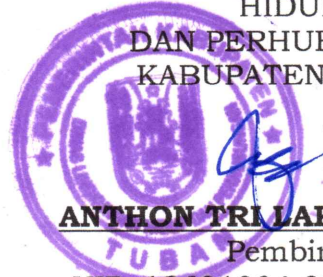
1. Meningkatkan kesadaran, kepedulian dan peran serta masyarakat dan menyediakan sarana dan prasarana dalam pengelolaan lingkungan;
2. Memperketat pengawasan dalam rangka pendisiplinan di bidang lingkungan hidup dan memberikan *reward* dan *punishment* kepada pelaku usaha yang taat/tidak taat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
3. Pemenuhan sarana dan prasarana lingkungan hidup baik yang bersumber dari APBD maupun pihak swasta;
4. Pemerataan Infrastruktur Perhubungan;
5. Pengendalian Lalu Lintas dengan Penataan, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
6. Menggalakkan transportasi massal dengan akses ke seluruh penjuru Kabupaten Tuban.

Kami berharap semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban Tahun 2025 ini dapat bermanfaat sebagai alat kendali dan alat penilaian kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna sehingga memerlukan perbaikan dan penyesuaian lebih lanjut.

Tuban, Januari 2026

KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP
DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN TUBAN



ANTHON TRI LAKSONO, S.PI.

Pembina

NIP. 19691004 200212 1 004